

RESOLUSI KONFLIK DALAM KERJA PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Pajar Hatma Indra Jaya

*Dosen Mata Kuliah Analisis Masalah Sosial dan
Advokasi di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam,
Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

Abstrak

Dakwah bil hal dimaknai sebagai kerja-kerja pengembangan masyarakat. Meskipun tidak diharapkan, kerja-kerja pengembangan masyarakat seringkali menimbulkan konflik. Dalam beberapa kasus di balik konflik terkadang terkandung manfaat ataupun hikmah yang besar. Namun demikian dalam kasus-kasus yang lain, konflik dapat mengurangi, menghambat efektifitas-efisiensi kerja, bahkan menjadi sumber masalah sosial. Dengan demikian dibutuhkan pengetahuan, prinsip, dan juga alat analisis untuk membaca konflik agar konflik dapat di manajemen dengan baik. Prinsip peer merupakan salah satu etika yang harus dipegang

pekerja pengembangan masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Selain itu Stage of Conflict Analisis dan analisis actor merupakan alat yang penting untuk digunakan dalam membaca situasi.

A. Pendahuluan: Wajah Konflik Mewakili Dewa Janus

Hampir semua orang Indonesia menganut suatu agama. Agama dengan ajarannya dipercaya sebagai jalan hidup untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pembumian ajaran agama yang melahirkan kesejahteraan dan keadilan merupakan kerja-kerja dakwah. Persoalan kemiskinan, putus sekolah, akses ke sarana kesehatan, akses tempat tinggal dan masalah-masalah sosial lainnya banyak dipecahkan dengan dakwah agama. Agama dengan dakwahnya menjadi solusi bagi pemecahan masalah sosial.

Meskipun agama sering menampilkan wajah positifnya, namun demikian dakwah agama terkadang menjadi sumber konflik. Beberapa konflik menjadi rumit karena memasukkan unsur agama. Bahkan konflik agama terkadang berubah menjadi praktik kekerasan yang dirasa tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai agama. Konflik ini sering terjadi karena kegiatan dakwah dimaknai sebagai perebutan umat atau pengaruh agama ke masyarakat. Dalam posisi ini agama berperan sebagai sumber atau pemicu konflik.

Konflik sebenarnya merupakan gejala kemasyarakatan yang akan senantiasa ada melekat dalam kehidupan setiap masyarakat. Tidak ada masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik. Oleh karena itu konflik tidak mungkin dilenyapkan. Sebagai satu gejala masyarakat yang melekat dalam setiap masyarakat, ia akan lenyap hanya ketika masyarakat itu sendiri lenyap.

Meskipun orang tahu bahwa konflik merupakan fitrah yang pasti muncul di masyarakat, namun demikian banyak masyarakat yang berusaha menghindari konflik dan berharap konflik tidak terjadi sama sekali dalam hidupnya. Narasi akan ketakutan terhadap konflik ini tentu saja punya dasar karena konflik seringkali berubah menjadi

masalah sosial yang menimbulkan kekerasan, merenggut solidaritas masyarakat, menghancurkan perekonomian masyarakat, bahkan terkadang sampai mengarah pada perusakan bangunan ataupun menimbulkan korban jiwa.

Situasi konflik yang menakutkan tersebut tidak hanya dapat disaksikan di negara tetangga. Catatan sejarah di Indonesia menunjukkan beberapa kali konflik disertai kekerasan, termasuk yang dibalut agama, telah merenggut korban jiwa.¹ Nasikun (2000) mengatakan Masyarakat Indonesia rawan konflik karena secara horizontal ataupun vertikal Masyarakat Indonesia tersegregasi.²

Meskipun banyak catatan sejarah menunjukkan akibat negative dari konflik, akan tetapi ada juga orang-orang dan perspektif teoritik yang meyakini bahwa konflik tidak dapat dihindarkan. Misalkan konsep fungsionalis konflik dari Luis Coser (1956) dimana konflik dipandang dapat meningkatkan solidaritas masing-masing kelompok. Bukan itu saja, dalam pandangan marxisme³, konflik

¹ Pembunuhan jenderal di masa Orde Lama yang disusul dengan pembantaian terhadap orang-orang PKI atau yang dianggap PKI tahun 1965 memberikan gambaran luka yang ditimbulkan oleh konflik-segregasi ideology (Robert Cribb, 2003; Iwan Gardono Sudjatmiko, 6). Konflik etnis di Sampit Kalimantan dan juga konflik antara Tionghoa dan pribumi yang terjadi berulang-ulang di Surakarta menambah daftar konflik (segregasi horizontal) yang mengarah pada tindakan negative makin banyak. Konflik antar agama di Maluku menurut KontraS paling tidak menyebabkan 8.000 orang terbunuh dan 282 ribu berada di pengungsian karena ketakutan dan tidak mempunyai tempat tinggal (Bina Bektianti dkk, *Angin Sejuk Malino Berhembus di Maluku*, <http://www.tempointeraktif.com>). Di Poso, Sulawesi Tengah juga terjadi kekerasan antar agama yang berujung pada pembakaran tempat ibadah, meskipun telah muncul Deklarasi Malino. Konflik juga terjadi di Kupang, Mataram, dan juga Sambas (Lihat Riza Sihbudi dan Moch Nursahim (2001)). Di Papua juga timbul ketidakadilan ekonomi yang mengarah pada konflik etnis serta sparatisme (Vidhyandika D. Perkasa dkk, 2006). Konflik Ahmadiyah juga menunjukkan satu pengalaman bahwa konflik mudah sekali berubah menjadi kekerasan yang memilukan (Tore Lindholm dkk, 2010: 714-716).

² Masyarakat Indonesia tersegregasi secara horizontal terdiri dari banyak suku, agama, bahasa, partai politik. Secara vertikal Masyarakat Indonesia juga berbeda dari segi pendapatan (Kesenjangan ekonomi, kaya-miskin).

³ Materialisme historis Karl Marx menunjukkan bahwa perkembangan masyarakat terjadi karena konflik kelas, yang berjalan secara alami dan dialektik dari tesa, antitesa, dan bergerak menuju sintesa (Andi M. Ramly, 2000).

selalu dimaknai “positif” untuk menuju masyarakat ideal.

- Dalam kehidupan sehari-hari sering juga dijumpai konflik yang berwajah positif, khususnya konflik dalam bisnis yang seringkali berubah menjadi persaingan usaha yang sehat dan melahirkan kreatifitas yang selama ini tidak pernah terbayangkan.⁴ Orang-orang yang sukses menjadi milyader banyak dilahirkan karena kemampuannya mengatasi konflik. Nabi Muhammad makin dikenal sebagai Al-Amin juga karena kemampuannya dalam menyelesaikan konflik letak Ka’bah.⁵ Konflik membuat manusia berusaha sekuat kemampuan dan mendayagunakan setiap potensinya sehingga mampu survive dalam situasi apapun.

Dengan demikian konflik dapat diibaratkan seperti Dewa Janus, satu wajahnya menunjukkan sisi kelembutan, namun di sisi yang lainnya dapat menampakan sifat kejam dan bengis. Dengan demikian diperlukan satu strategi ataupun sikap dalam dakwah pengembangan masyarakat agar konflik yang terjadi tidak sampai menimbulkan wajah kejamnya.

B. Bentuk Konflik

Sebelum menjelaskan tentang model analisis untuk mengatasi konflik, kita harus mengetahui bentuk-bentuk konflik yang sering terjadi. Terdapat empat bentuk konflik, yaitu:

⁴ Salah satu contoh konflik yang menyebabkan efek positif adalah persaingan antara berbagai perusahaan telekomunikasi di Indonesia yang dibiarkan bebas ternyata melahirkan persaingan harga layanan pesan singkat. Tarif sms yang dahulu sampai Rp. 800,- saat ini berubah menjadi Rp.100,- bahkan banyak operator telekomunikasi yang menawarkan sms gratis. Di dunia industry kuliner juga terjadi konflik yang melahirkan kreatifitas. Oleh karena persaingan dalam bisnis lele goreng, akhirnya muncul ide kreatif untuk menciptakan masakan lele dengan berbagai cara saji mulai asam manis sampai rica-rica lele. Jika tidak terjadi persaingan atau konflik tidak mungkin kita menikmati aneka makanan berbahan lele.

⁵ Muhammad mampu melakukan resolusi konflik pemindahan Ka’bah sebelum beliau diangkat sebagai nabi. Julukan sebagai orang yang dapat dipercaya sudah melekat dalam diri Muhammad karena kejujurannya dalam berdagang. Lihat Sayid Qutbh, *Di Bawah Naungan Al-Quran*, Gema Insani Press, 2000, 157-160.

- *No Konflik*: situasi ini dianggap sebagai kondisi ideal karena dirasakan tidak terjadi konflik sama sekali (zero konflik) di masyarakat. Meskipun demikian beberapa orang mengatakan bahwa situasi tanpa konflik membuat masyarakat tidak berkembang.
- *Latent Konflik*: Situasi ini merupakan situasi dimana tidak ada tanda-tanda terjadinya konflik. Namun sebenarnya benih-benih konflik telah ada di masyarakat akan tetapi tidak muncul di permukaan. Konflik ini masih berada dalam hati (sikap) masyarakat yang berupa kecurigaan. Jika benih-benih tersebut dibiarkan tumbuh, konflik tinggal menunggu waktunya.
- *Surface Konflik*: Konflik yang nampak dipermukaan. Dalam situasi ini masyarakat mengalami konflik, bahkan telah termanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun orang tidak mengetahui apa akar atau penyebab utama dari persoalan konflik tersebut. Bentuk konflik ini sering timbul karena miskomunikasi atau kesalahpahaman.
- *Open Konflik*: merupakan konflik yang telah muncul dan sebab akibatnya cukup mudah dibaca (Simon Fisher dkk, 2000: 5).

Ketika seseorang baru masuk dalam satu komunitas pertama kali untuk melakukan kerja-kerja pengembangan masyarakat, seringkali konflik yang muncul berbentuk *surface konflik*. Dalam situasi ini, sebenarnya tidak ada masalah antara pekerja pengembangan masyarakat dengan tuan rumah, hanya saja karena tidak ada saling pengertian dari keduanya seringkali mengakibatkan munculnya mis-komunikasi dan lahirnya konflik.

Konflik yang terjadi dalam kasus di atas merupakan konflik persepsi yang muncul karena perbedaan budaya yang termanifestasikan dalam perbedaan perilaku. Konflik yang berbentuk *surface* tersebut tidak mempunyai akar persoalan karena terjadinya hanya karena mis-komunikasi, mis-perspektif dengan maksud yang sama-sama baik. Kedua kelompok yang berkonflik biasanya tidak merasa melakukan kesalahan karena perilaku tersebut merupakan budaya yang telah biasa mereka lakukan dalam kehidupan di lain tempat. Namun

karena terjadi benturan kebudayaan keduanya saling menyalahkan dan jika hal itu tidak segera diatasi akan menimbulkan benih-benih konflik di masa mendatang.

Ketika seorang Jawa pergi ke Pulau Yapen Papua biasa disuguhi ikan yang besar-besar. Orang Jawa punya tradisi sungkan sehingga ikan tidak dihabiskan meskipun sebenarnya suka. Orang Jawa tidak ingin merepotkan tuan rumah. Sedangkan tradisi Papua menghabiskan ikan yang disajikan merupakan bentuk penghargaan-penghormatan kepada tuan rumah. Dalam situasi ini konflik dapat terjadi karena menilai kebudayaan lain dengan kaca mata kebudayaan sendiri.

Perbedaan tradisi jika tidak dikomunikasikan akan melahirkan kecurigaan yang dapat menimbulkan konflik. Komunikasi merupakan alat yang tepat untuk menyelesaikan konflik yang berbentuk *surface*. Selain karena tradisi budaya, perbedaan persepsi antar masyarakat yang dapat menimbulkan konflik antara lain karena perbedaan kilafiah keagamaan, bahasa yang berbeda, ataupun tampilan pekerja pengembangan masyarakat. Pekerja masyarakat yang berambut panjang misalkan dicurigai sebagai anak nakal. Pekerja pemberdayaan yang berbaju gamis terkadang juga dicurigai sebagai teroris. Dengan demikian dibutuhkan pengenalan atau saling memahami kebudayaan agar tidak menimbulkan *surface* konflik.

C. Analisis Konflik I: *Stage of Conflict Analisis*

Analisis adalah alat bantu untuk melihat, membaca, atau menafsir dalam hal ini adalah masyarakat yang sedang mengalami konflik dengan maksud untuk melakukan resolusi ataupun konflik *settlement*.⁶ Sebelum terjadinya konflik seorang pekerja

⁶ Konflik *settlement* diterjemahkan sebagai penyelesaian konflik artinya bagaimana agar konflik itu selesai atau secara lebih jelas berhenti. Jadi konflik *settlement* adalah upaya yang dilakukan untuk menghentikan konflik sehingga konflik tidak menunjukkan kenampakan dipermukaan. Dalam perang situasi ini disebut gencatan. Sedangkan resolusi konflik adalah pemecahan konflik, yaitu usaha tidak hanya berhenti pada ketidakadaan konflik yang muncul dipermukaan namun sampai melakukan pembongkaran ataupun penghilangan penyebab konflik di masyarakat.

pengembangan masyarakat dapat membaca tanda-tanda di masyarakat atau melakukan diagnosis terhadap situasi di masyarakat. Salah satu analisis yang dapat digunakan untuk mendiagnosis masyarakat adalah *Stage of Conflict* Analisis atau Tahapan Konflik.

Dalam analisis ini, konflik diasumsikan tidak akan tiba-tiba muncul, namun konflik mengalami alur yang bisa didiagnosis mulai dari awal (Daniel Dana, 2006: 45-53). Kekerasan yang merupakan buah dari konflik tidak mungkin timbul secara tiba-tiba.

Analisis ini berasumsi bahwa konflik sebelum menimbulkan kekerasan akan melewati tahapan 1). Pre-Konflik, 2). Konfrontasi, 3). Krisis, 4). Outcome 5). Post-konflik (Simon Fisher, 2000; 19). Krisis adalah situasi konflik yang menimbulkan situasi yang tidak diinginkan-kekerasan. Dalam situasi tersebut pihak-pihak yang berkonflik sudah matang membangun *in group feeling* dan *out group feeling* sehingga menganggap kita adalah sahabat dan mereka adalah musuh yang layak untuk diserang, diciderai, disakiti, bahkan di bunuh.

Dalam tahapan krisis tidak memungkinkan terjadinya dialog, kecuali salah satu kelompok bersedia mengalah ataupun merasa kalah. Ketika ada kelompok yang merasa kalah maka konflik sudah masuk tahap *Outcome* yang artinya dimungkinkan proses dialog dan negosiasi kembali. Jika situasi tersebut dapat dijaga pasti akan mengarah pada masa post-konflik atau resolusi sehingga konflik berakhir. Namun sebelum masuk dalam tahap krisis yang rawan menimbulkan kekerasan, pekerja pengembangan masyarakat dapat melakukan intervensi sehingga sebelum masuk pada krisis akar konflik telah diatasi. Dengan demikian sudah muncul resolusi konflik sebelum konflik tersebut membesar.

Dalam kerja pengembangan masyarakat, semisal KKN (Kuliah Kerja Nyata) pernah muncul konflik antara kepala desa dengan peserta KKN. Masalah itu terjadi karena kepala desa dari dalam kantor mendengar percakapan mahasiswa yang merasa terbebani dengan program yang diberikan kelurahan. Kepala desa merasa tersinggung dan memanggil salah satu kelompok yang ada di luar. Jika mahasiswa merasa terbebani, kepala desa meminta mereka pindah ke desa lain. Kelompok yang dipanggil tersebut berkilah karena

tidak merasa berbicara di luar seperti yang dituduhkan kepala desa karena selain kelompoknya terdapat beberapa mahasiswa kelompok lain yang bercakap-cakap di luar.

Meskipun mahasiswa merasa tidak bersalah, ketua kelompok kemudian melakukan rapat dan memutuskan untuk berkunjung ke kepala desa guna minta maaf jika ada mahasiswa yang telah berlaku tidak pantas, meskipun menurut anggota kelompoknya tidak melakukannya. Langkah ini biasa disebut sebagai konsultasi atau minta pendapat dari lembaga atau orang yang dihargai (Gunawan Wijaya, 2005: 86). Dalam beberapa buku konsultasi secara formal sering disebut *hearing*. Tujuan dari konsultasi adalah memunculkan konflik agar tidak berlarut-larut dan mengalami akumulasi. Tindakan tersebut juga merupakan salah satu strategi yang bisa dilakukan dalam manajemen atau resolusi konflik yang disebut dengan *Intensifying Konflik*.

Intensifying konflik adalah meningkatkan konflik dengan cara membuat konflik yang *latin-hiden* menjadi konflik yang terbuka. Tujuannya agar tidak terjadi berlarutnya prasangka sehingga benih-benih konflik tidak sampai masuk ke tahap krisis karena benih konflik yang terakumulasi sewaktu-waktu dapat menimbulkan bom waktu dalam bentuk kekerasan (Simon Fisher dkk, 2000: 5).

Intensifying konflik biasanya dilakukan dengan membangun wacana ataupun dialog untuk melawan label atau stereotipe negative yang mengena pada salah satu kelompok yang berkonflik. Hal itu misalkan dilakukan etnis Tionghoa untuk mengikis pelabelan mereka sebagai Cina ataupun diidentikan sebagai etnis yang kaya dan pelit.⁷ Prinsipnya sebelum meletus konflik, kecurigaan atau “gas” yang membesar tersebut harus di *gemboskan* terlebih dahulu agar tidak terakumulasi sehingga menimbulkan letusan hebat.

Menciptakan katub pengaman mungkin merupakan bahasa

⁷ Penyebutan Cina dianggap kurang tepat karena Cina menunjukkan keterpisahan dengan negara Indonesia (nasionalisme), padahal kelompok tersebut lahir dan dibesarkan di Indonesia yang artinya berbeda dengan Cina di negaranya. Tidak semua orang Tionghoa kaya, meskipun yang banyak terlihat di media yang kaya. Lihat Abdul Bagir Zein, *Etnis Cina dalam Potret Pembauran di Indonesia*, Prestasi Insan Indonesia, 2000, Jakarta. 80-81.

yang tepat sehingga kekecewaan tersebut tidak terakumulasi dan menghasilkan letupan. Katup pengaman inilah yang dapat diciptakan-direncanakan oleh pekerja pembangunan masyarakat.

Stage of Conflict Analisis dalam Kasus Pendampingan Korban Bencana Alam

Minimal telah dua kali mahasiswa UIN Sunan Kalijaga terlibat dalam penanganan bencana alam. Tahun 2006, mereka melakukannya di Bantul setelah terjadinya bencana gempa bumi dan tahun 2010 mereka kembali melakukannya di Sleman setelah bencana Gunung Merapi.

Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan oleh pekerja pengembangan masyarakat di daerah bencana adalah berkreasi untuk menciptakan katup pengaman bagi keresahan masyarakat sebelum meledak menjadi protes. Konflik yang menimbulkan kekecewaan dalam situasi bencana mudah sekali berubah menjadi protes dan kemarahan, mengingat masyarakat telah mengalami tekanan yang melahirkan kepanikan karena ketidakberdayaan mereka menghadapi alam.

“Kekalahan” terhadap alam menimbulkan tekanan, stress yang mudah memicu konflik. Maka dari itu, pekerja pengembangan masyarakat dapat melakukan fungsi pendampingan dan memainkan fungsinya sebagai konselor untuk melakukan *trauma hiling*. Peran ini dimainkan sampai masyarakat tenang dan siap masuk dalam tahap rekonstruksi. Dalam tahap rekonstruksi masyarakat mulai berbenah untuk kembali melakukan aktivitasnya.

Dalam kasus bencana Merapi dan gempa bumi banyak dokumen yang hilang mulai dari surat kendaraan bermotor, akte tanah, sampai akte kelahiran. Dokumen-dokumen tersebut merupakan dokumen yang sangat penting dan membutuhkan perjuangan yang panjang untuk mendapatkannya. Dalam system yang normal, masyarakat pasti akan mendapatkan kesulitan untuk penerbitan dokumen-dokumen tersebut jika tidak mempunyai syarat kelengkapannya. Padahal syarat kelengkapan untuk mendapatkan dokumen tidak mungkin didapatkan. Jika saluran untuk mengurus

dokumen-dokumen tersebut macet maka korban bencana alam akan makin mengalami tekanan sehingga tekanan yang sebenarnya disebabkan oleh alam bertemu dengan sistem yang buruk dapat menimbulkan protes dan konflik sosial.

Pekerja pengembangan masyarakat harus tanggap terhadap situasi tersebut sehingga sebelum masuk dalam tahap krisis mereka dapat berperan untuk menjalankan fungsinya guna melakukan advokasi sosial.⁸ Dalam konflik ini seorang pekerja masyarakat mengalami transformasi peran dari mediator menjadi advokat sosial.

D. Etika Advokasi: *Prinsip Peer*

Langkah awal untuk melakukan advokasi sosial adalah merumuskan tujuan advokasi dan membuat perencanaan advokasi (Ritu. S. Sharma, 2004: 38). Dalam membuat perencanaan advokasi seorang pekerja pengembangan masyarakat harus memperhatikan prinsip-prinsip terutama etika advokasi. Salah satu prinsip penting adalah menggunakan cara-cara lunak (*soft*) sebelum menggunakan metode advokasi yang bersifat keras (*hard*).⁹ Dengan demikian pekerja pengembangan masyarakat hendaknya menggunakan metode *hearing* ataupun lobi terlebih dahulu sebelum menggunakan metode negosiasi¹⁰, mediasi, ataupun demonstrasi.

Muncul satu prinsip yang unik dalam kerja-kerja pembelaan (advokasi), yaitu Prinsip *Peer*. *Peer* mempunyai sifat alamiah yang menunjukkan semakin besar daya dorong-tekanan terhadap *peer*

⁸ Advokasi adalah pembelaan terhadap masyarakat yang mengalami ketertindasan. Advokasi sosial adalah advokasi atau pembelaan yang bersifat non-litigasi atau dijalar hukum.

⁹ Metode advokasi lunak adalah metode advokasi yang tidak menekankan pada sikap yang bersebrangan. Sedangkan metode advokasi keras adalah metode advokasi yang sudah menganggap lawan adalah musuh yang tidak lagi bisa diajak kompromi. Istilah ini mengacu pada Suyud Margono yang menjelaskan dalam satu metode negoisasi ada yang berparadigma keras dan juga ada yang lunak (Suyud Margono, 2002: 50-51).

¹⁰ Negosiasi merupakan proses tawar-menawar/bargaining untuk mengambil jalan tengah diantara dua orang-kelompok atau lebih terkait pengambilan keputusan (Depsos RI, 2006: 33).

maka akan menghasilkan daya tolak yang semakin besar juga. Dengan demikian harus disadari semakin kita menggunakan cara-cara yang keras atau bahkan kasar dalam pembelaan maka pihak lawan juga akan semakin bertahan pada prinsipnya. Jika hal itu telah terjadi maka penyelesaian secara *win-win solution* akan sulit terwujud karena kedua belah pihak sudah menganggap terjadinya permusuhan.

Pendekatan-pendekatan yang lebih humanis dan persuasif berupa lobi yang bersifat kekeluargaan dan penjelasan-penjelasan yang masuk akal lebih tepat digunakan dalam tahapan awal pembelaan. Namun jika hal itu tidak mungkin dilakukan maka anda dapat menggunakan cara-cara yang lain.

E. Analisis II: Analisis Aktor

Lobi merupakan metode dalam advokasi yang dilakukan dengan cara mendekati pembuat kebijakan ataupun siapa saja yang mempunyai akses kepada pembuat kebijakan untuk mempengaruhi munculnya atau merubah suatu kebijakan (Simon Fisher dkk: 2000, 100). Dalam melakukan lobi dibutuhkan analisis aktor.

Analisis aktor mempunyai prinsip utama melakukan pemetaan terhadap semua aktor yang terlibat dalam sistem. Dalam pemetaan ini tidak boleh ada satu peran pun yang terlewatkan dalam pandangan kita. Setelah langkah ini dilakukan maka harus mendeskripsikan posisi serta peran masing-masing aktor dan hubungan atau jaringan antar aktor tersebut .

Dalam analisis ini, prinsip utama yang harus dilakukan adalah mencari aktor yang benar-benar berpengaruh dan menentukan. Efektifitas dan efisiensi merupakan targetan yang dikejar dalam kerja pengembangan masyarakat. Jika anda salah melakukan lobi dan hanya melakukan lobi kepada orang yang tidak berpengaruh anda sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Ketika melobi pekerja pengembangan masyarakat jangan sampai punya prinsip melobi kepada actor yang paling mudah, namun harus melakukan lobi kepada actor yang berada paling atas dalam struktur atau system (Pajar Hatma Indra Jaya, 2008: 58-63).

Jika aktor yang paling atas tersebut telah berhasil kita yakinkan maka jaringan yang ada di bawahnya biasanya akan mengikuti aktor ini. Sebaliknya akan sulit sekali jika kita harus melobi satu persatu, mulai dari jajaran bawah sampai atas. Budaya birokrasi di Indonesia menunjukkan kepada kita bahwa sangat sering menjumpai jajaran bawah merupakan jajaran yang tidak mengenal kebijaksanaan, kompromi, dan lobi. Jajaran bawah merupakan pelaksana peraturan yang hanya mempraktikkan peraturan secara hitam putih dan dipegang secara kaku. Mereka tidak mempunyai keberanian untuk berinisiatif merubah peraturan. Dengan demikian sasaran lobi adalah aktor yang mempunyai peran untuk membuat atau merubah kebijakan.

Dalam kasus kebijakan akte kelahiran, kita tidak perlu melobi petugas pencatat-administrasi. Lobi dapat dilakukan kepada bupati secara langsung ataupun dapat juga dilakukan melalui pihak ketiga yang punya pengaruh kepada bupati, seperti ketua DPRD ataupun anak dari bupati. Memberikan pemahaman ataupun meyakinkan kepada bupati akan manfaat bagi popularitas bupati dan manfaat bagi korban bencana merupakan cara yang bisa ditempuh. Jika lobi telah berhasil maka jajaran administrasi akan menyesuaikan dengan kebijakan bupati.

F. Penutup

Dalam kerja dakwah pengembangan masyarakat interaksi dengan orang-orang baru tidak terhindarkan, demikian juga konflik akan senantiasa muncul seiring intensitas interaksi dengan masyarakat. Selalu melakukan analisis dan evaluasi ketika akan ke lapangan dan setelah di lapangan merupakan hal yang wajib dilakukan pekerja pengembangan masyarakat untuk mendiagnosis konflik yang mungkin terjadi. Jangan sampai analisis dan evaluasi terhadap konflik baru dilakukan setelah konflik masuk tahap krisis.

Meskipun telah melakukan diagnosis sejak awal terkadang konflik tetap tak terhindarkan. Jika konflik telah terjadi maka prinsip *peer* dapat digunakan para pekerja pengembangan masyarakat. Tetap melakukan komunikasi dengan pihak "lawan," minta maaf meskipun

berada dalam pihak yang benar, serta mendudukan persoalan pada posisi obyektif merupakan jalan yang terbaik. Meskipun demikian dalam beberapa kasus terkadang persoalan tidak selesai. Jika hal itu yang terjadi pekerja pengembangan masyarakat harus percaya bahwa dibalik suatu konflik terkadang muncul hikmah yang besar. Misalkan, berdirinya Pondok Pesantren Budi Mulyo di Kaliagung Kulonprogo lahir dari proses konflik.¹¹

¹¹ Setelah menempuh pendidikan pondok pesantren di Jawa Timur Rusli membantu mengelola pondok pesantren di Serang Kulonprogo. Namun karena muncul persoalan menyebabkan dirinya terusir dari pondok tersebut. Kebetulan salah satu jama'ah mengetahui peristiwa tersebut sehingga mengajak Rusli untuk menempati masjid kampung Nglotak. Melihat kesungguhan Rusli, Pak Dukuh mewakafkan sebagian tanahnya untuk pesantren sehingga muncullah Pesantren Budi Mulyo yang berdiri karena berkah konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Bagir Zein, *Etnis Cina dalam Potret Pembauran di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Insan Indonesia, 2000.
- Andi M. Ramly, *Peta Pemikiran Karl Marx*, Yogyakarta: LkiS, 2000.
- Bina Bektiati, dkk., *Angin Sejuk Malino Berhembus di Maluku*, <http://www.tempointeraktif.com>; Daniel Dana, *Resolusi Konflik: Alat Bantu Mediasi Untuk Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2006.
- Depsos, *Advokasi Sosial: Untuk Rehabilitasi Penyandang Cacat Tubuh*, Surakarta: Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Daksa "Prof. Dr. Soeharso", 2006.
- Gunawan Wijaya, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.
- Iwan Gardono Sudjatmiko, Kehancuran PKI 1965-1966, dalam buku Onghokham, dkk., *Sejarah: Memandang Tragedi Nasional 1965 Secara Jernih*, Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI).
- Lewis Coser, *The Function of Social Conflict*, New York: The Free Press, 1956.
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2000.
- Pajar Hatma Indra Jaya, *Analisis Masalah Sosial: Breakdown Teori-teori Sosial Menuju Praksis Sosial*, Senter, Yogyakarta, 2008.
- Ritu R. Sharma, *Pengantar Advokasi: Panduan Latihan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Riza Sihbudi dan Moch Nursahim, *Kerusuhan Sosial Di Indonesia, Studi Kasus Kupang, Mataram dan Sambas*, Jakarta: Grasindo, 2001.
- Robert Cribb, *The Indonesian Killings: Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*, Yogyakarta: Mata Bangsa dan Serikat Indonesia, 2003.

Sayid Quthb, *Di Bawah Naungan Al-Quran*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Simon Fisher, dkk, *Working With Conflict: Skill and Strategies for Action*, London: Zed Books, 2000.

Suyud Margono, *Alternative Despute Resolution & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.

Tore Lindholm, dkk., *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh: Sebuah Referensi Tentang Prinsip-Prinsip dan Praktek*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.

Vidhayandhika D. Perkasa, dkk, *Partisipasi, Kohesi Sosial, dan Resolusi Konflik: Pengalaman dari Wamena, Papua*, Jakarta: CSIS, 2006.

